

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR FIGUR	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Tinjauan Teori.....	16
2.1.1. Teori Perlindungan Hukum.....	16

2.1.2.	Hak Asasi Manusia	18
2.1.3.	Relasi Antara Hukum Nasional dengan Hukum Internasional	24
2.2.	Tinjauan Konseptual.....	26
2.2.1.	Pencari Suaka dan Pengungsi	26
2.2.2.	Hak Mencari Suaka	33
2.2.3.	<i>Convention Relating to the Status of Refugees 1951</i>	36
2.2.4.	Ratifikasi di Indonesia.....	38
BAB III	METODE PENELITIAN	42
3.1.	Jenis Penelitian	42
3.2.	Jenis Data	44
3.3.	Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.4.	Jenis Pendekatan	48
3.5.	Sifat Analisis Data	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	51
4.1.	Hasil Penelitian	51
4.2.	Perlindungan HAM Bagi Pencari Suaka dan Pengungsi Menurut Konvensi Pengungsi 1951	58
4.2.1.	Perlindungan HAM Bagi Pencari Suaka Secara Sebelum Diterima Menjadi Pengungsi di Suatu Negara Menurut Konvensi Pengungsi 1951	58

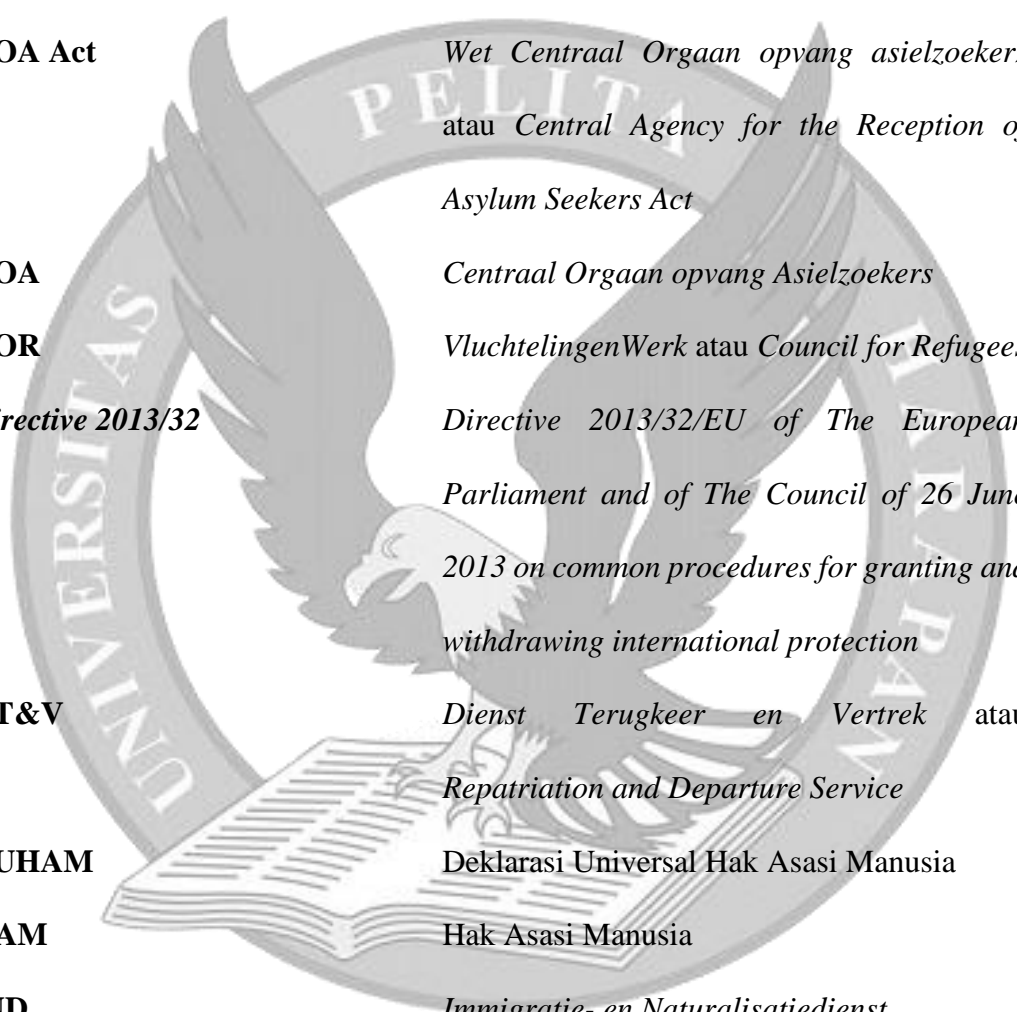
4.2.2.	Perlindungan HAM Bagi Pengungsi yang Telah Diterima di Dalam Suatu Negara Menurut Konvensi Pengungsi 1951	66
4.3.	Analisis Hukum terhadap Prosedur Pelaksanaan Penerimaan dan Perlindungan bagi Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia dan Belanda	75
4.3.1.	Prosedur Pelaksanaan Penerimaan dan Perlindungan bagi Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia.....	75
4.3.2.	Prosedur Pelaksanaan Penerimaan dan Perlindungan bagi Pencari Suaka dan Pengungsi di Belanda	92
4.3.3.	Perbandingan Prosedur Pelaksanaan Penerimaan dan Perlindungan bagi Pencari Suaka di Indonesia dan Belanda	119
4.3.4.	Pengembangan Hukum Perlindungan HAM bagi Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia	125
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	140
5.1.	Kesimpulan	140
5.2.	Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA		145

DAFTAR FIGUR

Figur 4.3.1.92
Figur 4.3.2.	107
Figur 4.3.2.1.	112
Figur 4.3.4.	139



DAFTAR ISTILAH



AVIM	<i>Vreemdelingenpolitie</i>
CAT	<i>Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment</i>
COA Act	<i>Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers atau Central Agency for the Reception of Asylum Seekers Act</i>
COA	<i>Centraal Orgaan opvang Asielzoekers</i>
COR	<i>VluchtelingenWerk atau Council for Refugees</i>
<i>Directive 2013/32</i>	<i>Directive 2013/32/EU of The European Parliament and of The Council of 26 June 2013 on common procedures for granting and withdrawing international protection</i>
DT&V	<i>Dienst Terugkeer en Vertrek atau Repatriation and Departure Service</i>
DUHAM	<i>Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia</i>
HAM	<i>Hak Asasi Manusia</i>
IND	<i>Immigratie- en Naturalisatiedienst</i>
IOM	<i>International Organization for Migration</i>
KMar	<i>Koninklijke Marechaussee</i>
Konvensi Pengungsi 1951	<i>Convention Relating to the Status of Refugees 1951</i>

LPPS	Lembaga Penerimaan Pencari Suaka
PBB	Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perdirjen 02.07/2016	Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 Tentang Penanganan Imigran Ilegal yang Menyatakan Diri Sebagai Pencari Suaka atau Pengungsi
Perdirjen 08.05/2010	Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 Tentang Penanganan Imigran Ilegal
Perpres 125/2016	Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
Protokol 1967	<i>The Protocol Relating to the Status of Refugees</i>
RSD	<i>Refugee Status Determination</i>
RVA	<i>Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005</i>
UNHCR	<i>United Nations High Committee for Refugees</i>
UU HAM	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
UU Keimigrasian	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

UU PI	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
UUD 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
VA	<i>Verlengde Asielprocedure</i>
VCLT	<i>Vienna Convention on the Law of Treaties</i> 1969

